

## KATA PENGANTAR

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian dapat menyelesaikan dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Tahun 2014-2018. Penyusunan Perubahan Renja juga mengacu kepada RKPD Kabupaten Banjar tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar di dalam visi ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah”***.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Tahun 2018.

Martapura, 08 Januari 2018  
Kepala Dinas Komunikasi Informasi,  
Statistik dan Persandian Kab. Banjar



**Dr. Ir. H. M. FARID SOUFIAN, MS**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip: 19601218 198602 1 004

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1    LATARBELAKANG .....	4
1.2    LANDASAN HUKUM .....	4
1.3    MAKSUD DAN TUJUAN .....	6
1.4    SISTEMATIKA PENULISAN .....	7
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN LALU</b>	
2.1    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DKISP TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DKISP .....	8
2.2    ANALISIS KINERJA PELAYANAN DKISP .....	11
2.3    ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DKISP .....	12
2.4    REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	15
2.5    PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....	15
<b>BAB III TUJUAN, SASARAM, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1    TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	15
3.2    TUJUAN DAN SASARAN RENJA DKISP .....	15
3.3    PROGRAM DAN KEGIATAN .....	16
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>18</b>

### LAMPIRAN

- RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

## DAFTAR TABEL

		Hal
TABEL 2.1	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN AHUN 2017 DENGAN TRIWULAN III .....	8
TABEL 2.2	CAPAIAN KINERJA DISKOMINFO KAB. BANJAR TAHUN 2017 .....	10
Tabel 2.3	ISU STRATEGIS DISKOMINFO BERDASARKAN TUPOKSI .....	11
TABEL 3.1	PENJABARAN VISI, MISI DAN TUJUAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BANJAR ...	16
TABEL 3.2	URAIAN PRORAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 .....	17

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja yang mengacu pada pasal ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaanya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Melalui Tahapan yang sudah ditetapkan. Untuk itu, Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian menyusun dengan rinci dan operasional Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018 sebagai jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar, tentunya mengacu pada tahapan yang telah ditetapkan. Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar menyusun kembali Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan pembangun selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berkembang serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan visi Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar yaitu ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah***

### 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja ( Renja - SKPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) . Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas.
2. Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM);
  - c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
Pasal 150 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 137 ayat (1) menyatakan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar tahun 2018 adalah sebagai acuan Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banjar sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten Banjar.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

#### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- C. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV. PENUTUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN 2017

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DISKOMINFOSTAPER Tahun Lalu (Tahun 2017) dan Capaian Renstra DISKOMINFO

Di tahun 2017 Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar akan melaksanakan 8 program dengan 20 Kegiatan.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar terbentuk pada Tahun 2017 berdasarkan pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar.

**Tabel 2.1**

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017

NO.	URAIAN BELANJA PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI S/D BULAN INI		
			FISIK (%)	KEUANGAN	
				Rp	%
<b>A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	18.250.000	96.69	18.193.000	96.69
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	14.000.000	93.01	13.021.587	93.01
3.	Penyediaan jasa Kebersihan kantor	4.000.000	100	4.000.000	1000
4	Penyediaan alata tulis kantor	22.582.0000	100	22.582.000	100
5	Penyediaan Makanan dan minuman	390.096.000	76.08	390.096.000	76.08
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	239.000.000	89.93	214.932.127	66.67
7	Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran	728.525.001	92.14	671.241.504	92.14
<b>B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	331.416.800	93.37	309.457.300	93.37
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	150.200.000	89.33	134.175.000	89.33
3	Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor	199.177.999	99.73	198.645.000	99.73
4	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	38.000.000	92.14	37.919.000	99.79
<b>C PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR</b>					
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	123.000.000	93.42	114.905.200	93.42
<b>D PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>					
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.225.000	89.82	48.704.500	89.82
2	Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.690.000	100	1.690.000	100
<b>E PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>					
1	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	775.744.400	95.46	740.552.950	95.46

2	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	503.584.000	94.79	503.584.000	94.76
<b>F PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH</b>					
1	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	149.995.000	96.55	144.815.000	96.55
<b>G PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>					
1	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	245.650.000	97.83	240.329.555	97.83
<b>H PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA</b>					
1	Penyebarluasan Informasi pembangunan Daerah	3.126.380.000	99.81	3.120.593.660	99.81
2	Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	203.800.000	97.10	197.886.274	63.69
3	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	294.671.600	90.83	267.662.378	90.83
		<b>7.613.987.800</b>	<b>95.53</b>	<b>7.273.744.006</b>	<b>95.53</b>

Sedangkan capaian Renstra Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar sampai triwulan III tahun 2018 secara ringkas dapat dilihat dalam table berikut

**Tabel 2.2**

Capaian Kinerja DISKOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. BANJAR Tahun 2018 sampai dengan Triwulan III

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
1	Cakupan Layanan Internet dan Telepon Seluler	%	76.38	20 %
2	Prosentase Penggunaan Website Domain dan Subdomain SKPD	%	33 SKPD	33 SKPD
	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang di Tindak Lanjuti Melalui Unit Pengaduan Masyarakat yang Terintergrasi	%	100 %	100 %

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Komunikasi Daerah                      Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar sampai pada Triwulan III tahun 2017 telah

melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya :

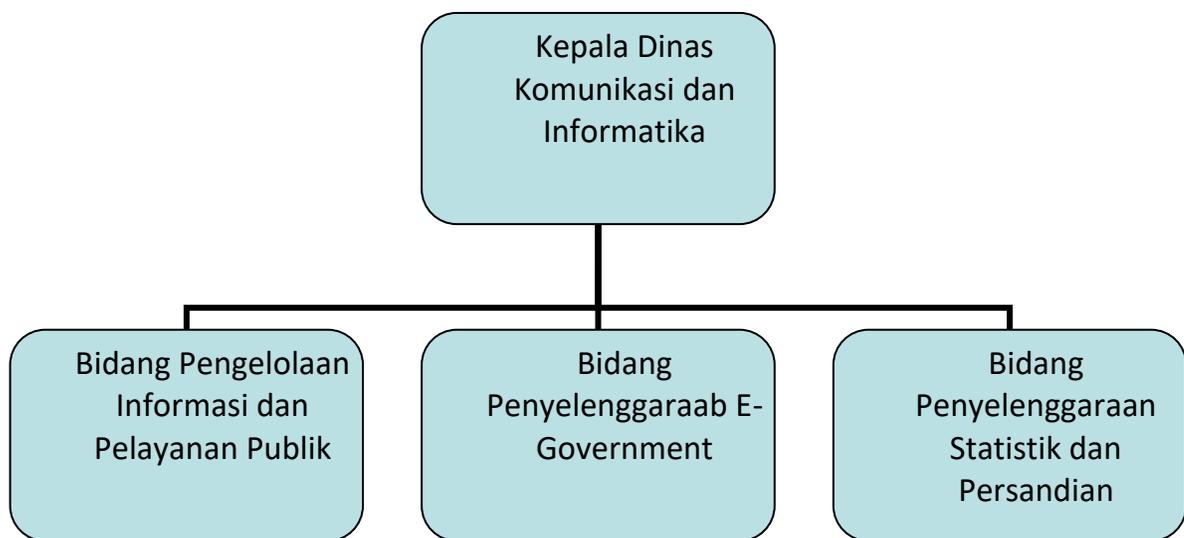
Untuk mencapai pelayanan yang optimal, pemerintah daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan azas-azas pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan aturan umum penyelenggaraan Negara.

Tugas, fungsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar tertuang dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Daerah Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar mempunyai 3 bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti tergambar pada gambar 2.1 di bawah ini :

**Gambar 2.1**

Pembagian Bidang Diskominfo Statistik dan Persandian Kab. Banjar



### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang tertuang dalam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian , yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, teknologi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Daerah Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Isu-isu strategis Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar berdasarkan tupoksinya dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Isu Strategis Diskominfo Berdasarkan Tupoksi

Tugas Pokok	Fungsi	Isu Strategis
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan informasi komunikasi publik, Penyelenggaraan E-Government dan Penyelenggaraan Statistik dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.	1. penyusunan kebijakan teknis urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government dan penyelenggaraan statistik dan persandian	Belum Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Belum Optimalnya pengembangan SDM
		Pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam penyebarluasan informasi

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar tidak jauh berbeda dengan rancangan tahun sebelumnya, di tahun 2018 terdapat 1 (satu) Program kegiatan rekening kegiatan yang masih belum termuat dalam RKA / DPA/ DPPA Tahun 2018, Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar yaitu pada Program/ Kegiatan Seksi Penyelenggaraan Persandian, hingga sampai tahun (N) seksi Penyelenggaraan Persandian belum memiliki Kode Rekening Kegiatan.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar di awal tahun 2018 dimana usulan masyarakat dapat ditampung melalui Musrenbang Kecamatan, belum ada usulan terkait program dan kegiatan yang menyangkut tugas pokok Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN

#### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sejalan dengan paradigm baru di era globalisasi yaitu *Techno Economy*, teknologi menjadi factor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjasinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya menjadi perekonomian yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Akibat dari kondisi tersebut, salah satu kekuatan bangsa dapat pula diukur dari kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai factor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energy untuk peningkatan daya saing. Pembangunan iptek merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu, iptek menentka tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumberdaya baru yang lebih bernilai.

Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan Negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi melalui Sistem Informasi sangatlah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah harus berjalan beriringan dalam mengembangkan potensi daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya animo masyarakat yang berusaha berinteraksi dengan pemerintah daerah khususnya tentang pembangunan di Kabupaten Banjar.

Kondisi tersebut memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan situasi yang berkembang di Kabupaten Banjar yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar dengan seimbang melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

#### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANJAR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Fungsi Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar yaitu terkait penyusunan kebijakan teknis urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, teknologi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Adapaun struktur organisasi Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar terdiri dari Sekretariat, Bidang Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik, Bidang Penyelenggaraan Statistik dan Persandian, dan Bidang Penyelenggaraan E- Government

Isu strategis yang diangkat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia
3. Pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam penyebarluasan informasi

Berdasarkan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, berikut penjabaran misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar.

**Tabel 3.1**  
**Penjabaran visi, misi dan tujuan**  
**Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian**  
**Kabupaten Banjar**

MISI	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan ketersediaan layanan komunikasi dan informasi yang terkini	Peningkatan penyebarluasan informasi dan komunikasi pembangunan daerah kepada masyarakat	Terwujudnya penyebarluasan informasi dan komunikasi pembangunan daerah kepada masyarakat
Mewujudkan pelayanan prima melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peningkatan layanan public yang efisien dan efektivitas pemerintahan serta meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan publik dan terwujudnya transparansi pemerintahan melalui akses informasi publik
Mewujudkan ketersediaan data statistik yang berkualitas	Pengembangan data dan informasi statistic daerah yang up to date/ terkini	Tersusunnya buku data dan informasi statistik daerah yang up to date/ terkini
Mewujudkan penyelenggaraan persandian	Meningkatkan kualitas sarana dan prasaran yang dapat menunjang kinerja di bidang persandian	Terwujudnya penyelenggaraan bidang persandian yang bertanggung jawab
Meningkatkan kapastitas SDM dalam penguasaan teknologi Informasi Komunikasi statistik dan persandian	Mendorong peningkatan SDM dalam rangka mewujudkan kompetensi dan profesionalisme ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)	Terwujudnya aparatur yang handal dalam pelaksanaan tugas dibidang teknologi informasi dan komunikasi statistik dan persandian

### 3.3 Program dan Kegiatan

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrument kebiakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Semntara kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaiana sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,

dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar tahun 2018 merupakan pelaksanaan operasional tahun pertama dari Renstra Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian tahun 2014 - 2018 dan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2018. Hal tersebut tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Uraian Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Tahun 2018**

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
	(2)	(5)	(6)	(7)
	<b>Non Urusan</b>			
	-			
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	3.600.000,-	Pendapatan Daerah
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	161.400.000,-	Pendapatan Daerah
3	Penyediaan Jasa Kebersihan	1 Tahun	30.140.000,-	Pendapatan Daerah
4	Penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	35.297.500,-	Pendapatan Daerah
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	16.900.000,-	Pendapatan Daerah
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1.350.000,-	Pendapatan Daerah
7	Penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	199.584.000,-	Pendapatan Daerah
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	260.000.000,-	Pendapatan Daerah
9	Penyediaan Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	1 Tahun	92.600.000,-	Pendapatan Daerah
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	656.113.700,-	Pendapatan Daerah
2	Pengadaan Mebeleur	1 Tahun	74.230.000,-	Pendapatan Daerah
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	38.300.000,-	Pendapatan Daerah
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	1 Tahun	72.550.000,-	Pendapatan Daerah
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	1 Tahun	285.406.000,-	Pendapatan Daerah
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	26.500.000,-	Pendapatan Daerah
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Kapistas Sumber Daya Aparatur</b>			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1 Tahun	79.700.000,-	Pendapatan Daerah
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	123.100.000,-	Pendapatan Daerah
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Tahun	58.900.000,-	Pendapatan Daerah
<b>E</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>			

1	Penyusuna dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	1 Tahun	163.675.000,-	Pendapatan Daerah
2	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	1 Tahun	144.110.000,-	Pendapatan Daerah
<b>F Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>				
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	1 Tahun	5.098.270.200,-	Pendapatan Daerah
2	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	100 %	66.940.000,-	Pendapatan Daerah
3	Pengadaaan Alat Studio dan Komunikasi	100 %	317.750.000,-	Pendapatan Daerah
4	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	100 %	300.950.000,-	Pendapatan Daerah
5	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	4 Dokumen	333.760.000,-	Pendapatan Daerah
<b>G Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</b>				
1	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	1 Tahun	321.150.000,-	Pendapatan Daerah
<b>H. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>				
1	Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	100 %	14.000.000,-	Pendapatan Daerah
<b>I Program Kerjasama Informsi dan Mas Media</b>				
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	100 %	203.000.000,-	Pendapatan Daerah
2	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %	4.112.400.000,-	Pendapatan Daerah
3	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	100 %	664.740.000,-	Pendapatan Daerah
			<b>14.010.290.900</b>	

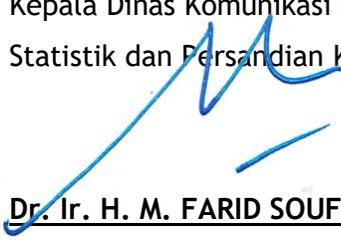
## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar tahun 2018 disusun sebagai pelaksanaan tahun pertama bagi Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, karena SKPD tersebut baru berdiri pada tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar diharapkan dapat memberi umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas oleh para pemimpin manajemen dan seluruh staf Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis Komunikasi Informasi pada masyarakat dengan pembangunan IPTEK melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (*stakeholder*) dalam mewujudkan *Good Governance*.

Martapura, 08 Januari 2018

Kepala Dinas Komunikasi Informasi  
Statistik dan Persandian Kab. Banjar

  
Dr. Ir. H. M. FARID SOUFIAN, MS

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP: 19601218 198602 1 004